KSSK KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Siaran Pers
Nomor: 3/KSSK/Pers/2019

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Didukung oleh Persepsi Positif Terhadap Prospek Ekonomi Indonesia

Jakarta, 30 Juli 2019 – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat berkala Jumat (26/7) menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan II 2019 terjaga dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Dalam rapat yang diadakan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), KSSK memandang stabilitas sistem keuangan domestik tetap baik, ditopang industri perbankan yang tetap sehat dan pasar keuangan domestik yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama. *Pertama*, menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dipicu respons sejumlah bank sentral di negara maju dan negara berkembang yang melonggarkan kebijakan moneter, termasuk bank sentral AS yang diprediksi akan menurunkan suku bunga kebijakan moneter. *Kedua*, menariknya imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik. *Ketiga*, membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia, seiring peningkatan *sovereign rating* Indonesia oleh Standard and Poor's (S&P). Berbagai perkembangan positif ini mendorong aliran masuk modal asing ke Indonesia, yang pada gilirannya memperkuat Rupiah serta meningkatkan kinerja pasar obligasi negara dan pasar saham.

Kendati demikian, KSSK mencatat beberapa perkembangan eksternal dan domestik yang harus diwaspadai. Dari *eksternal*, salah satunya adalah berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS–Tiongkok yang berpotensi melebar ke negara yang menjadi *hub* bagi ekspor Tiongkok ke AS. Faktor ini terus menekan volume perdagangan dunia serta memperlambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi global yang melemah pada gilirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak. Dari *dalam negeri*, KSSK melihat bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pertumbuhan serta memperbaiki *current account deficit* (CAD) di tengah melemahnya perekonomian global.

Merespons hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Koordinasi kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

Mempertimbangkan perkembangan diatas, Bank Indonesia (BI) merespons dengan memperkuat bauran kebijakan. BI menempuh kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 50 bps pada Juni 2019 dan suku bunga kebijakan BI 7-day *Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps pada Juli 2019. Kebijakan ini ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali. Kebijakan moneter tersebut juga didukung oleh kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan sistem

pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Momentum positif perekonomian domestik turut didukung oleh kinerja fiskal yang moderat. Hingga akhir Juni 2019, realisasi APBN secara umum masih menunjukkan kinerja yang positif, baik pada sisi Pendapatan Negara maupun Belanja Negara. Pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal pada tahun 2019, dengan secara konsisten terus melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan produktif, antara lain dengan menjaga rasio utang pada batas yang aman, meningkatkan efisiensi pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan yang produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

Kinerja intermediasi dan profil risiko sektor jasa keuangan tetap positif dan terkelola dengan baik yang didukung oleh resiliensi permodalan yang masih solid dalam mengantisipasi *downside risks* dari volatilitas eksternal. Untuk mendukung optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangun ekonomi nasional yang sehat dan berkesinambungan, pada paruh kedua 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan serangkaian kebijakan antara lain terkait pendalaman pasar keuangan domestik, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, serta beberapa penyempurnaan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

LPS mencermati bahwa suku bunga simpanan sudah berada dalam tren yang stabil dan diharapkan dapat turun sejalan dengan perbaikan kondisi likuiditas perbankan dan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh BI. Selanjutnya LPS juga tetap melakukan pemantauan atas cakupan (*coverage*) penjaminan baik nominal dan rekening, dimana berdasarkan data terakhir dinilai masih memadai dalam rangka mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan.

Rapat berkala KSSK dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2019.

Untuk informasi lebih lanjut:
sekretariatkssk@kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
Siaran Pers KSSK
Nomor : 3/KSSK/Pers/2019
Tanggal : 30 Juli 2019

Di bidang fiskal, hingga akhir Juni 2019, realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp898,76 triliun (41,51% terhadap target APBN 2019) atau tumbuh 7,84% (*yoy*) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Secara lebih rinci, Penerimaan Perpajakan mencapai Rp688,94 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp209,08 triliun dengan masing-masing tumbuh sebesar 5,42% (*yoy*) dan 18,24% (*yoy*).

Sementara itu, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.034,51 triliun (42,00% terhadap pagu APBN 2019), tumbuh 9,59% dari periode yang sama pada tahun 2018. Tingginya pertumbuhan realisasi Belanja Negara terutama didukung oleh kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp630,57 triliun atau 38,58% terhadap pagu APBN 2019 atau tumbuh 12,92% dibandingkan penyerapan Belanja Pemerintah Pusat untuk periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp403,95 triliun atau 48,86% dari alokasinya dalam APBN 2019 serta tercatat tumbuh 4,77% secara tahunan.

Dengan demikian, Defisit Anggaran hingga akhir semester I-2019 tercatat sebesar Rp135,75 triliun atau 0,84% terhadap PDB, dengan Keseimbangan Primer berada pada posisi negatif Rp0,98 triliun. Realisasi Pembiayaan hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp175,35 triliun, meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp195,72 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp15,27 triliun, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,60 triliun.

Seiring dengan kembalinya arus modal investor asing ke pasar keuangan domestik sebagai respons dari kebijakan moneter global yang lebih akomodatif, kinerja pasar keuangan domestik meningkat. Pada pasar modal, IHSG secara *year to date* per 30 Juni 2019 ditutup meningkat ke level 6.358,63 dengan *net buy* investor nonresiden sebesar Rp68,80 triliun. Sementara itu, rata-rata *yield* Surat Berharga Negara (SBN) juga turun 57,64 bps *ytd* dengan *net buy* investor nonresiden Rp95,50 triliun.

Kontribusi kinerja intermediasi sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga positif didukung dengan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Pada Juni 2019, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mulai meningkat ke level tertinggi dalam delapan bulan terakhir yaitu sebesar 7,42% *yoy*. Sementara itu penyaluran kredit perbankan dan piutang pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 9,92% dan 4,29% *yoy*. Di pasar modal, jumlah penawaran umum sampai Juni tercatat sebesar Rp 96,25 triliun yang berasal dari 93 penawaran umum (sepanjang 2018 Rp166 triliun, 168 PU). Profil risiko lembaga jasa keuangan relatif terjaga dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Non-Performing Financing* (NPF) secara *gross* masing-masing tercatat sebesar 2,50% dan 2,82% dari eksposur penyaluran dana. Selain itu, kecukupan likuiditas memadai dengan rasio alat likuid perbankan terhadap *non-core deposits* (AL/NCD) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) masing-masing sebesar 90,09% dan 215,56%. Seiring dengan turunnya suku bunga acuan dan pelonggaran kebijakan giro wajib minimum, intermediasi dan kondisi likuiditas bank ke depan diproyeksikan semakin baik. Permodalan lembaga jasa keuangan dalam mengantisipasi potensi risiko sekaligus mendukung pertumbuhan masih solid, tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan sebesar 23,18% serta *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan industri asuransi jiwa masing-masing sebesar 313,5% dan 662,9%.

LAMPIRAN
Siaran Pers KSSK
Nomor : 3/KSSK/Pers/2019
Tanggal : 30 Juli 2019

Di tengah masih adanya ketidakpastian global, OJK juga mencermati beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas dan potensi kenaikan risiko kredit lembaga jasa keuangan. Di antaranya adalah pengaruh *outlook* pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan eskalasi kebijakan proteksionisme perdagangan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan, OJK telah menyempurnakan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan serta menerbitkan serangkaian kebijakan untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan memperluas akses investor di pasar keuangan domestik.

Di bidang penjaminan untuk nasabah perbankan, LPS mencermati bahwa suku bunga simpanan sudah berada dalam tren yang stabil dan diharapkan dapat turun sejalan dengan perbaikan kondisi likuiditas perbankan dan pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh BI. Sepanjang tahun 2019 hingga akhir minggu ketiga Juli 2019, rata-rata suku bunga deposito Rupiah pada 66 bank *benchmark* terpantau turun dan berada di level 6,11%. Sementara itu, rata-rata suku bunga valuta asing di 19 bank *benchmark* pada periode yang sama terpantau stabil di level 1,26%. Sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan tersebut pada evaluasi tanggal periode Mei 2019, LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan sebesar 7.00% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 9,50% untuk simpanan di BPR, sementara tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum juga dipertahankan tetap sebesar 2,25%.

Selanjutnya LPS juga tetap melakukan pemantauan atas cakupan (*coverage*) penjaminan baik nominal dan rekening, dimana berdasarkan data terakhir dinilai masih memadai dalam rangka mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan. Berdasarkan data Juni 2019 jumlah rekening yang dijamin LPS adalah sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 288.812.628 rekening. Sementara secara nominal jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,77% dari total simpanan atau setara dengan Rp2.566,43 triliun.